

P D R B

Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran

TRIWULAN IV
2020

<https://aceh.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN
TRIWULAN IV TAHUN 2020

Katalog BPS : 9302020.11
Nomor Publikasi : 11550.2102
Nomor ISSN : 2502.0889
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : ix + 53 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Ihsanurijal
Editor : Tasdik Ilhamudin
Penulis : Afrizah
Pengolah Data & Grafik : Afrizah
Penyunting dan Finalisasi : Tasdik Ilhamudin
Cover : Afrizah

Diterbitkan Oleh :

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

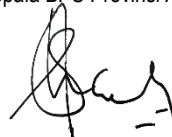
Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Maret 2021

Kepala BPS Provinsi Aceh



Ihsanurijal

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar dan Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Infografis.....	ix
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	4
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga ...	5
1.2.3 Konsumsi Pemerintah.....	6
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	6
1.2.5 Perubahan Inventori.....	8
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	9
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	9
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah.....	10
1.3 Indikator Ekonomi <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	10
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh.....	13
2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh.....	15
2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	16
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran.....	19
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>c-to-c</i>	21
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i>	22
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i>	24
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera.....	25
Infografis.....	31

IV. Analisis ICOR	33
Lampiran	39
Daftar Pustaka	51

<https://aceh.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan IV Tahun 2020 (Triliun Rupiah).....	15
Gambar 2. Nilai PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen).....	17
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>c-to-c</i> Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 (Persen).....	21
Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>y-on-y</i> dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 (persen).....	23
Gambar 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (Persen).....	24
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> (Persen).....	25
Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB (<i>c-to-c</i>) Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (Persen).....	26
Gambar 8. Pertumbuhan PDRB (<i>y-on-y</i>) Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)	27
Gambar 9. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera (<i>y-on-y</i>) Triwulan IV Tahun 2020 (Persen).....	28
Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB (<i>q-to-q</i>) Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (persen).....	29
Gambar 11. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (<i>y on y</i>) Triwulan IV tahun 2016-2020, Provinsi Aceh.....	35
Gambar 12. Perbandingan ICOR Aceh dan Indonesia, Triwulan IV Tahun 2016-2020.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)	41
Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)	42
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	43
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	44
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	45
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100).....	46
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (Persen).....	47
Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku	48
Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran (persen).....	49
Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera.....	50

EKONOMI ACEH TRIWULAN IV-2020



Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2010-2020



Pertumbuhan
Tertinggi Lapangan Usaha

Informasi dan
Komunikasi

11,98%



Abas Dasar
Harga Berlaku
166,38
Tribiliun

Pertumbuhan
Triwulanan
Q-to-Q
-0,57%

Abas Dasar
Harga Konstan
131,59
Tribiliun

Pertumbuhan
Tahunan
Y-on-Y
-2,99%

Pertumbuhan
Kumulatif
C-to-C
-0,37%

Pertumbuhan
Tertinggi Pengeluaran

PMTB

3,75%



Nilai dan Distribusi PDRB Regional Sumatera



Berdasarkan nilai pertumbuhannya, provinsi dengan pertumbuhan tertinggi Tahun 2020 adalah :



Bengkulu
-0,02%



Sumatera Selatan
-0,11%



Aceh
-0,37%



PENDAHULUAN

<https://aceh.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000.

Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRRT, karena konsumsi LNPRRT sudah menjadi komponen tersendiri. Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah

tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumah tangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi profesi (Orprof),
4. Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi,
5. Lembaga swadaya masyarakat,
6. Lembaga keagamaan,
7. Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi dan kebudayaan,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, organisasi buruh dan organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa-Jasa.

1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Yang juga termasuk PK-P adalah *social transfer in kind purchased market production*. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 2008, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri. Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PKP diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak

termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal,
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :
 - a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
 - d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.
4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.
5. Sistem persenjataan.
6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah

berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
8. Margin pedagang atau makelar jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas.
9. Barang modal lainnya.

1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.

- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, pula pasir, dan gandum.

1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.2.8 Net Ekspor Antardaerah

Nilai net ekspor antardaerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antardaerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah.

1.3 Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Dalam teori ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor produksi yang penting, di samping faktor produksi sumber daya manusia, dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah karena investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, yaitu misalnya karena investasi digunakan untuk membeli atau menambah barang-barang modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, maka hasil-hasil produksi di wilayah tersebut diharapkan juga akan meningkat.

Ukuran kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu diberikan oleh suatu ukuran atau indikator ekonomi yang disebut sebagai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Dengan ICOR, perkiraan kebutuhan investasi dapat diperkirakan untuk mencapai suatu tingkat kinerja ekonomi yang ditetapkan karena ICOR merupakan ukuran atau indikator makro yang menghubungkan antara investasi dengan pendapatan wilayah.

Salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB menjelaskan besarnya realisasi investasi fisik yang telah dilakukan, investasi fisik terdiri dari investasi yang dilakukan untuk membeli atau menambah atau memperbaiki barang-barang modal seperti bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal), mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan, dan melakukan pekerjaan investasi fisik lainnya seperti reklamasi lahan, pemerataan lahan untuk kantor, dan sebagainya.

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah :

$$ICOR = \frac{\Delta k}{\Delta Y} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

Δk adalah investasi, atau barang modal baru, penambahan kapasitas terpasang

ΔY adalah penambahan/pertumbuhan output

Dalam praktik, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya investasi yang ditanamkan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta k = I$ (I = investasi), maka rumus (1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus (2) ini disebut dengan Gross *ICOR*. Dalam penerapannya rumus Gross *ICOR* ini lebih sering dipakai, karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap. Dalam beberapa hal, untuk kasus-kasus tertentu investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

I_t adalah investasi pada tahun ke- t ; (dalam hal ini adalah PMTB ADHB tahun ke- t)

Y_t adalah output pada tahun ke- t ; (PDRB ADHB menurut pengeluaran tahun ke- t)

Y_{t-1} adalah output pada tahun ke- $t-1$; (PDRB ADHB menurut pengeluaran tahun $t-1$)

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Koefisien *ICOR* negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien *ICOR*-pun menjadi negatif. Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi apabila ada

penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

Koefisien *ICOR* yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga tidak efisien dan menghasilkan koefisien *ICOR* yang relatif besar.

Penghitungan *ICOR* dapat dilakukan dengan metode akumulasi yaitu berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t . Perumusan *ICOR* dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai t_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots \dots \dots (5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien *ICOR* ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Akan tetapi metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi tidak bisa mencerminkan *inefficiency* yang memang terjadi dalam praktek.

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan *ICOR* ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan. Penghitungan *ICOR* dalam publikasi ini dilihat pada kondisi triwulan IV periode tahun 2016-2020 menggunakan metode akumulasi yaitu rumus (5), sementara untuk *ICOR* triwulan IV setiap tahunnya menggunakan metode standar rumus (3).

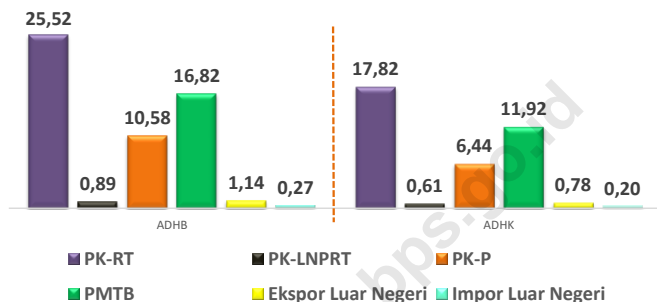


TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

<https://acehps.com>

II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh



Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan IV Tahun 2020 (Triliun Rupiah)

Perkembangan ekonomi Aceh pada triwulan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan triwulan IV 2019, dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 0,08 triliun rupiah dan 1,02 triliun rupiah. Pada triwulan IV 2020, nilai PDRB ADHB adalah sekitar 42,74 triliun rupiah dan nilai PDRB ADHK adalah sekitar 33,21 triliun rupiah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Triwulan III 2020), nilai PDRB ADHB mengalami kenaikan yaitu sekitar 0,59 triliun rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK tahun 2010 mengalami penurunan yaitu sekitar 0,19 triliun rupiah.

Nilai PDRB ADHB Provinsi Aceh pada triwulan IV tahun 2020 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yaitu sebesar 25,52 triliun rupiah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berada di posisi kedua yaitu sebesar 16,82 triliun rupiah dan komponen Pengeluaran

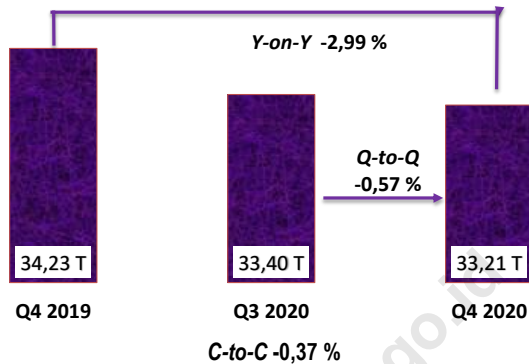
Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 10,58 triliun rupiah berada di posisi ketiga. Sementara itu, nilai ADHB komponen lainnya, seperti komponen ekspor luar negeri, komponen pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), dan komponen impor luar negeri mempunyai nilai dibawah 2 triliun rupiah, masing-masing sekitar 1,14 triliun rupiah, 0,89 triliun rupiah, dan 0,27 triliun rupiah.

Sementara itu, nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan IV tahun 2020 juga didominasi oleh komponen PKRT, yaitu sekitar 17,82 triliun rupiah. Posisi kedua juga ditempati oleh nilai komponen PMTB yaitu sekitar 11,92 triliun rupiah. Komponen PKP menduduki posisi ketiga yaitu sekitar 10,58 triliun rupiah. Selanjutnya diikuti oleh komponen ekspor luar negeri, komponen pengeluaran LNPRT, dan komponen impor luar negeri, masing-masing sekitar 0,78 triliun rupiah, 0,61 triliun rupiah, dan 0,20 triliun rupiah.

2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Tinjauan perkembangan PDRB secara tahunan (*y-on-y*) triwulan IV tahun 2020 menggambarkan perkembangan PDRB ADHK 2010 pada triwulan IV tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019. Perekonomian Aceh secara *y-on-y* mengalami penurunan sebesar 2,99 persen. Penurunan ekonomi Aceh sedikit lebih rendah dari penurunan ekonomi secara nasional yaitu turun sekitar 2,19 persen. Penurunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pandemi *covid-19* yang terjadi hampir di seluruh dunia.

Sementara itu, perekonomian Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) triwulan IV tahun 2020 yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan IV tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2020. Perekonomian Aceh secara *q-to-q* mengalami penurunan yaitu sekitar 0,57 persen. Sementara itu, secara nasional, perkembangan ekonomi (*q-to-q*) juga mengalami penurunan yaitu sekitar 0,42 persen.



Gambar 2. Nilai PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c-to-c) triwulan IV tahun 2020 yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan I sampai triwulan IV tahun 2020 (Januari hingga Desember tahun 2020) dibandingkan dengan triwulan I sampai triwulan IV tahun 2020 (Januari hingga Desember tahun 2019). Pertumbuhan ekonomi Aceh secara c-to-c juga mengalami penurunan yaitu sekitar 0,37 persen (Gambar 2). Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional secara (c- to-c) juga mengalami penurunan, yaitu turun sekitar 2,07 persen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

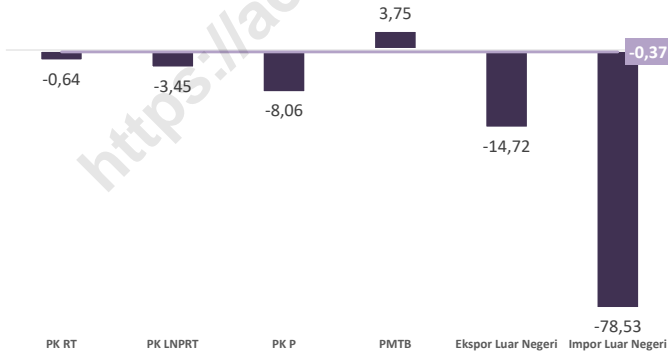


*PDRB PROVINSI ACEH
MENURUT PENGELUARAN*

<https://aceh.bps.go.id>

3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *c-to-c*

Perekonomian Aceh pada triwulan IV 2020 secara *c-to-c*, dapat dilihat dari nilai PDRB yang mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, penurunan hampir terjadi pada semua komponen, paling besar terjadi pada komponen impor luar negeri, yaitu turun sebesar 78,53 persen. Namun demikian komponen ini merupakan faktor pengurang terhadap total PDRB sehingga tidak berdampak negatif. Selanjutnya, komponen yang mengalami penurunan terbesar kedua adalah komponen ekspor luar negeri yaitu turun sebesar 14,72 persen, terutama pada subkomponen ekspor jasa. Penurunan atau penghematan anggaran beberapa kegiatan yang difokuskan pada penanganan pandemi covid-19 merupakan pengaruh utama pada penurunan ekonomi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, komponen ini mengalami penurunan sebesar 8,06 persen (Gambar 3).



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi *c-to-c* Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)

Komponen lainnya yang mengalami penurunan adalah pengeluaran konsumsi LNPR, turun sebesar 3,45 persen. Pada tahun ini tidak ada daerah di Aceh yang melaksanakan pemilu atau pilkada, hal ini merupakan salah satu

faktor terjadinya penurunan pada komponen ini. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga ikut mengalami penurunan yaitu sebesar 0,64 persen, terutama didominasi oleh penurunan pada subkomponen pembelian pakaian, transportasi, dan rekreasi budaya. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 3,75 persen. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Aceh dan pembangunan ruas jalan di beberapa daerah.

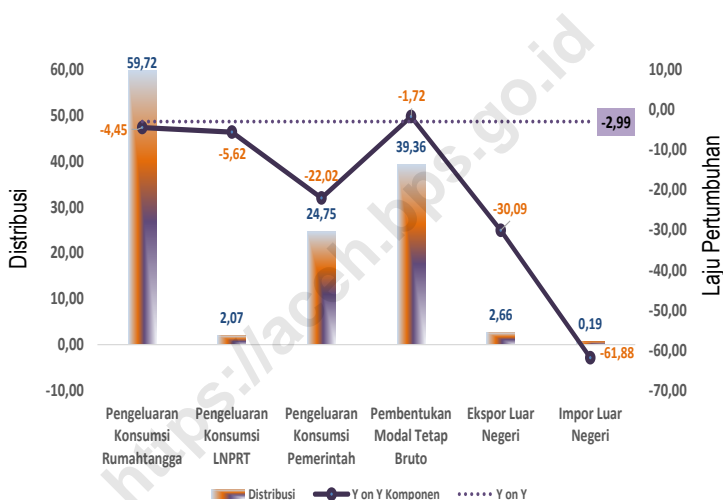
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Perekonomian ekonomi Aceh secara *y-on-y* juga mengalami penurunan. Berdasarkan PDRB pengeluaran, penurunan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Komponen impor luar negeri mengalami penurunan paling besar, yaitu sekitar 61,88 persen. Komponen ekspor luar negeri mengalami penurunan paling besar kedua yaitu sekitar 30,09 persen, terutama pada subkomponen ekspor jasa, masyarakat tidak tercatat melakukan perjalanan keluar negeri. Walaupun demikian, komponen ekspor luar negeri tidak memberikan andil besar terhadap PDRB total, peranannya hanya sekitar 2,66 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan sekitar 22,02 persen. Penghematan dan *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 menjadi sebab utama penurunan ekonomi pada komponen ini. Komponen ini memberikan peranan sebesar 24,75 persen terhadap PDRB. Komponen pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan PMTB juga ikut mengalami penurunan, masing-masing sebesar 5,62 persen, 4,45 persen, dan 1,72 persen (Gambar 4).

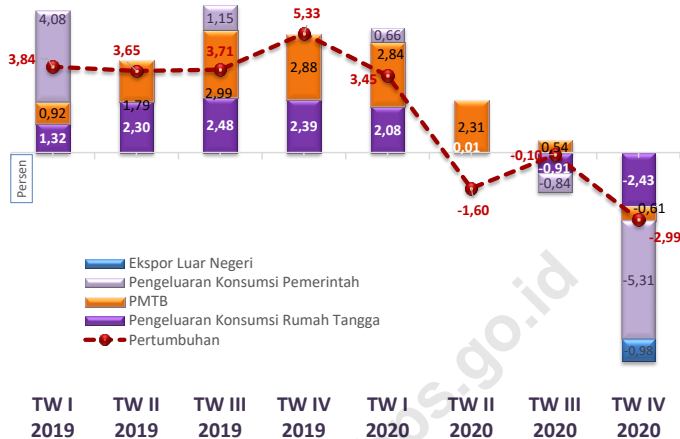
Komponen pengeluaran konsumsi LNPR tidak banyak memberikan andil pada PDRB total, hanya memberikan peran sebesar 2,07 persen. Sementara itu, penurunan yang terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi

rumah tangga, terutama karena penurunan pada hampir semua subkomponen, kecuali komunikasi dan kesehatan. Komponen rumah tangga masih memberikan andil paling besar dalam kegiatan ekonomi Aceh yaitu mencapai 59,72 persen. Sementara itu, komponen PMTB memberikan peranan terbesar kedua terhadap PDRB total yaitu 39,36 persen.



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi y-on-y dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)

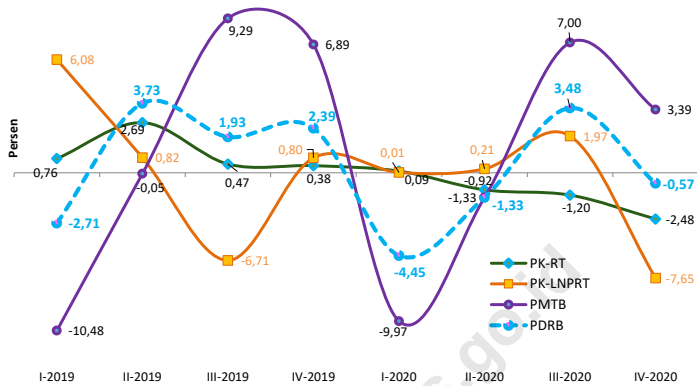
Berdasarkan sumbernya, pada triwulan IV-2020 sumber penurunan ekonomi terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 5,31 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 2,43 persen. Sementara sumber penurunan lainnya berasal dari komponen ekspor luar negeri dan komponen PMTB yaitu masing-masing sebesar 0,98 persen dan 0,61 persen (Gambar 5).



Gambar 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh y-on-y (Persen)

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q-to-q

Perekonomian Aceh pada triwulan IV-2020 turun sebesar 0,57 persen dibandingkan triwulan III-2020. Walaupun secara total mengalami penurunan, tetapi terdapat beberapa komponen yang mengalami pertumbuhan, yaitu diantaranya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, dan komponen PMTB, masing-masing tumbuh sebesar 10,15 persen, 5,85 persen, dan 3,39 persen. Sementara itu, komponen impor luar negeri mengalami pertumbuhan paling tinggi, mencapai 227,43 persen, namun komponen ini merupakan faktor pengurang terhadap total PDRB. Adapun komoditi barang impor yang mengalami kenaikan adalah terutama pada mesin/pesawat mekanik.



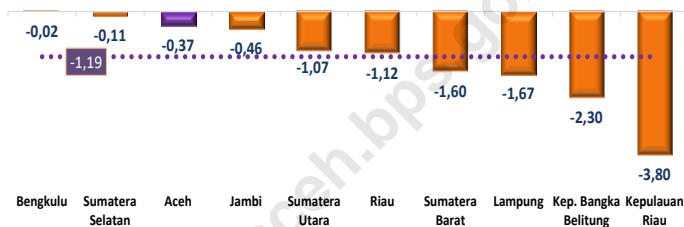
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q-to-q (Persen)

Adapun komponen yang mengalami penurunan adalah komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu sekitar 7,65 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 2,48 persen. Penurunan pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT utamanya disebabkan karena berkurangnya bantuan sosial dampak covid-19 yang diberikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat. Pada triwulan sebelumnya, masyarakat Aceh juga merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihiwasallam, sehingga pada triwulan IV 2020 terjadi penurunan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (Gambar 6).

3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

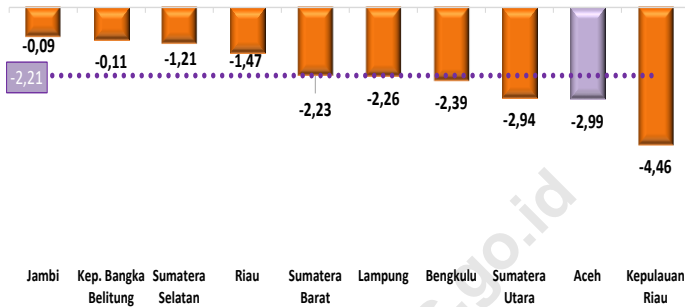
Jika dilihat secara kumulatif (*c-to-c*) pertumbuhan ekonomi regional Sumatera mengalami penurunan yaitu sebesar 1,19 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi *covid-19* yang sedang mewabah dan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Penurunan terjadi pada semua provinsi se-Sumatera, paling parah terjadi penurunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sekitar 3,80 persen, sedangkan penurunan paling kecil

terjadi di Bengkulu yaitu sekitar 0,02 persen. Penurunan kedua paling ringan terjadi di Sumatera Selatan yaitu sekitar 0,11 persen, dan diikuti Aceh dengan penurunan sekitar 0,37 persen. Jambi menduduki peringkat penurunan keempat paling kecil setelah Aceh, yaitu sekitar 0,46 persen. Sementara itu, lima provinsi lainnya mengalami penurunan ekonomi sekitar 1,07 persen sampai 2,30 persen (Gambar 7).



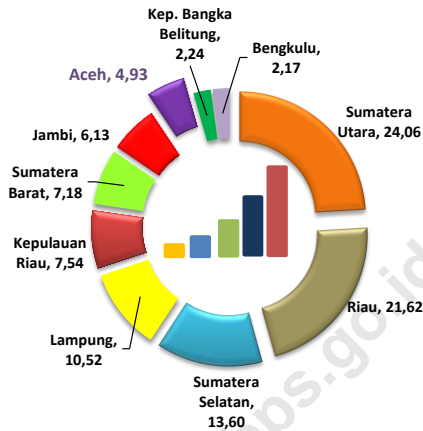
Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB c-to-c Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)

Perkembangan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan IV 2020 secara tahunan (*y-on-y*) turun sebesar 2,21 persen dibanding dengan triwulan IV 2019. Penurunan paling parah terjadi di Kepulauan Riau yaitu sekitar 4,46 persen, dan paling ringan terjadi di Jambi yaitu sekitar 0,09 persen. Sementara itu, Provinsi Aceh berada pada posisi kedua paling parah setelah Kepulauan Riau, yaitu sekitar 2,99 persen. Selanjutnya, Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Riau mengalami penurunan ekonomi masing-masing sekitar 0,11 persen, 1,21 persen, dan 1,47 persen. Perkembangan ekonomi Sumatera Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh juga mengalami penurunan, yaitu sekitar 2,94 persen (Gambar 8).



Gambar 8. Pertumbuhan PDRB (y-on-y) Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)

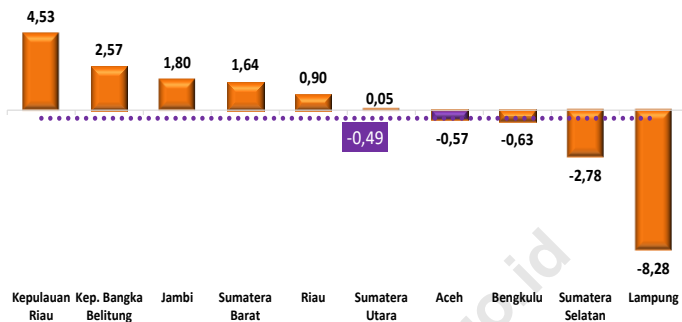
Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 24,06 persen, 21,62 persen, dan 13,60 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan IV tahun 2020 berasal dari tiga provinsi tersebut. Kontribusi terkecil terhadap PDRB se-Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yaitu berkontribusi masing-masing 2,17 persen dan 2,24 persen. Sementara itu, Aceh memiliki kontribusi sebesar 4,93 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan IV 2020 dan merupakan kontribusi terendah setelah Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung (Gambar 9).



Gambar 9. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera (y-on-y) Triwulan IV tahun 2020 (Persen)

Secara *quarter to quarter (q-to-q)* pertumbuhan ekonomi regional Sumatera juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,49 persen. Jika dilihat provinsi yang berada pada regional Sumatera, terdapat empat provinsi yang mengalami penurunan. Adapun provinsi tersebut adalah Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung, masing-masing terjadi penurunan sebesar 0,57 persen, 0,63 persen, 2,78 persen, dan 8,28 persen. Sementara itu, enam provinsi lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kepulauan Riau sebesar 4,53 persen, kemudian diikuti Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,57 persen, dan Jambi sebesar 1,80 persen, serta Sumatera Barat sebesar 1,64 persen. Selanjutnya Riau dan Sumatera Utara mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 1 persen, masing-masing sebesar 0,90 persen dan 0,05 persen (Gambar 10).



Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB *q-to-q* Regional Sumatera Triwulan IV Tahun 2020 (Persen)

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

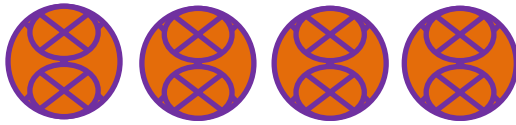


ANALISIS ICOR

$$\text{ICOR} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PERUBAHAN OUTPUT (PDRB)}}$$



**ICOR NEGATIVE TERJADI KARENA
PDRB Q4 2020 LEBIH KECIL
DARI PDRB Q4 2019**

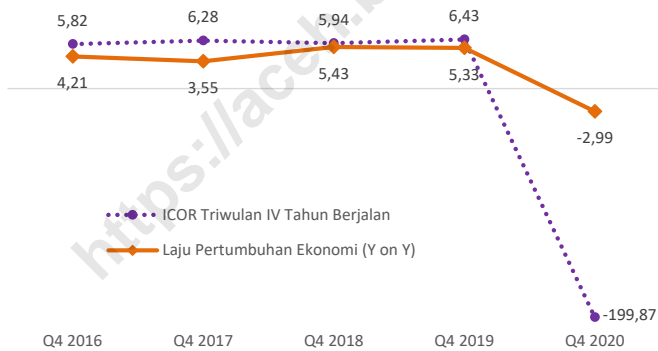


ANALISIS ICOR

<https://aceh.bps.go.id>

IV. ANALISIS ICOR

Sebagaimana diketahui bahwa koefisien *ICOR* adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Tinggi rendahnya *ICOR* juga mencerminkan tinggi rendahnya biaya ekonomi atas investasi agregatif. Tambahan kapital (investasi) baru ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran *ICOR* diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan output. Nilai PMTB dan tambahan output diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Aceh. Semakin tinggi nilai *ICOR*, semakin banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output.



Gambar 11. *ICOR* dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y on y) Triwulan IV tahun 2016-2020, Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar 11, dapat dilihat bahwa Besaran koefien *ICOR* mencerminkan produktivitas PMTB yang pada akhirnya menyangkut pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, semakin kecil koefisien *ICOR* menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi.

Koefisien *ICOR* pada triwulan IV tahun 2016 bernilai 5,82, sementara laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21 persen. Ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan penambahan 1 unit output pada triwulan IV tahun 2016 membutuhkan sebanyak 5,82 unit PMTB. Pada triwulan IV tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,55 persen dengan nilai *ICOR* sebesar 6,28 yang berarti bahwa membutuhkan 6,28 unit PMTB untuk menaikkan tambahan output sebesar 1 unit. Pada triwulan IV tahun 2018, hanya membutuhkan 5,94 unit PMTB untuk menaikkan tambahan output sebesar 1 unit, laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 5,43 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi diperoleh selama triwulan IV periode 2016-2020. Selang setahun berikutnya, pada triwulan IV tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi mampu dicapai sebesar 5,33 persen, dengan nilai PMTB yang dibutuhkan untuk menaikkan tambahan output sebanyak 6,43 unit. Sementara itu, pada triwulan IV tahun 2020, seperti diketahui bahwa sedang terjadinya pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan, dengan laju pertumbuhan turun sebesar 2,99 persen, hal ini juga berdampak pada nilai *ICOR* yang juga bernilai negatif yaitu mencapai -199,87.



Gambar 12. Perbandingan *ICOR* Aceh dan Indonesia, Triwulan IV Tahun 2016-2020

Secara akumulasi, nilai *ICOR* Provinsi Aceh periode triwulan IV tahun 2016 sampai 2020 adalah sebesar 7,90, sementara nilai *ICOR* Indonesia adalah 6,26. Provinsi Aceh butuh 7,90 unit PMTB untuk menaikkan tambahan output sebanyak 1 unit, sedangkan Indonesia hanya butuh 6,26 unit PMTB untuk menaikkan tambahan 1 unit output. Pada triwulan IV tahun 2020, nilai *ICOR* Indonesia dan Aceh bernilai negatif, hal ini terkait dengan penurunan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang melanda hampir diseluruh wilayah. Nilai *ICOR* setiap triwulan IV pada tahun berjalan juga dapat diketahui bahwa *ICOR* Provinsi Aceh selalu lebih besar daripada *ICOR* Indonesia. Hal ini berarti, Aceh membutuhkan lebih banyak unit PMTB dalam menaikkan tambahan 1 unit output dibandingkan dengan Indonesia.

<https://aceh.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://aceh.bps.go.id>

Lampiran 1.

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	24,89	25,92	26,35	26,14	26,52	26,41	25,97	25,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,94	0,95	0,89	0,90	0,91	0,93	0,95	0,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	9,88	10,15	13,20	5,23	9,79	9,70	10,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,91	13,99	15,87	16,93	15,26	15,07	16,19	16,82
5. Perubahan Inventori	-0,02	0,02	0,00	0,01	-0,19	-0,47	0,08	0,53
6. Ekspor Luar Negeri	1,43	1,62	1,51	1,46	1,77	1,01	1,16	1,14
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,64	1,26	1,80	0,85	0,45	0,09	0,08	0,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	-6,59	-10,25	-11,32	-14,95	-7,68	-12,53	-11,82	-12,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	38,83	40,87	41,64	42,82	41,37	40,12	42,14	42,74

Lampiran 2.

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen	Atas Dasar Harga Konstan							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	18,01	18,50	18,58	18,65	18,67	18,50	18,28	17,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	0,69	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,03	5,94	6,12	8,26	3,24	5,95	5,85	6,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,02	10,02	11,35	12,13	10,92	10,78	11,53	11,92
5. Perubahan Inventori	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,11	-0,29	0,05	0,28
6. Ekspor Luar Negeri	0,95	1,09	1,06	1,12	1,33	0,76	0,74	0,78
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,37	0,77	1,12	0,52	0,27	0,07	0,06	0,20
8. Net Ekspor Antar Daerah	-0,70	-2,68	-3,21	-6,06	-1,72	-4,00	-3,64	-4,45
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	31,62	32,80	33,43	34,23	32,71	32,27	33,40	33,21

Lampiran 3.

Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan C to C							
	2019				2020			
	Triw I	Triw I-II	Triw I-III	Triw I-IV	Triw I	Triw I-II	Triw I-III	Triw I-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,29	3,20	3,63	3,81	3,66	1,81	0,65	-0,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	24,85	21,66	14,72	10,93	-5,18	-5,46	-2,76	-3,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	69,42	16,26	12,07	7,48	6,91	2,38	-0,44	-8,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,87	4,41	6,12	6,73	8,97	8,27	5,86	3,75
5. Perubahan Inventori								
6. Ekspor Luar Negeri	49,89	37,34	33,22	28,13	39,12	1,99	-9,18	-14,72
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-24,04	24,24	68,40	56,78	-27,30	-70,20	-82,32	-78,53
8. Net Ekspor Antar Daerah								
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,84	3,74	3,73	4,14	3,45	0,88	0,54	-0,37

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan <i>Y on Y</i>							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,29	4,10	4,49	4,35	3,66	0,01	-1,64	-4,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	24,85	18,65	2,27	0,57	-5,18	-5,75	3,02	-5,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	69,42	0,22	6,45	0,00	6,91	0,08	-4,57	-22,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,87	6,01	9,27	8,35	8,97	7,58	1,60	-1,72
5. Perubahan Inventori								
6. Ekspor Luar Negeri	49,89	27,96	25,96	15,83	39,12	-30,47	-30,63	-30,09
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-24,04	79,74	163,85	20,32	-27,30	-91,04	-94,65	-61,88
8. Net Ekspor Antar Daerah								
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,84	3,65	3,71	5,33	3,45	-1,60	-0,10	-2,99

Lampiran 5.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan Q to Q							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	0,76	2,69	0,47	0,38	0,09	-0,92	-1,20	-2,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,08	0,82	-6,71	0,80	0,01	0,21	1,97	-7,65
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-63,28	96,05	3,05	34,79	-60,74	83,53	-1,74	10,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-10,48	-0,05	13,29	6,89	-9,97	-1,33	7,00	3,39
5. Perubahan Inventori								
6. Ekspor Luar Negeri	-1,27	14,37	-2,33	5,03	18,59	-42,84	-2,56	5,85
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-12,85	105,84	45,99	-54,06	-47,34	-74,63	-12,84	227,43
8. Net Ekspor Antar Daerah								
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-2,71	3,73	1,93	2,39	-4,45	-1,33	3,48	-0,57

Lampiran 6.

Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen	Indeks Implisit							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	138,19	140,11	141,81	140,10	142,06	142,75	142,10	143,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	138,25	138,45	138,64	138,69	140,63	143,40	143,34	145,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,38	166,20	165,78	159,84	161,36	164,65	165,89	164,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	138,83	139,69	139,82	139,58	139,78	139,86	140,46	141,13
5. Perubahan Inventori								
6. Ekspor Luar Negeri	150,23	148,63	141,44	130,97	133,23	133,47	156,67	145,53
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	170,91	164,48	160,63	165,27	165,01	129,62	126,64	136,43
8. Net Ekspor Antar Daerah								
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	122,80	124,62	124,57	125,11	126,50	124,31	126,20	128,71

Lampiran 7.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Laju Indeks Implisit							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1,52	1,39	1,21	-1,20	1,39	0,49	-0,46	0,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,36	0,14	0,14	0,03	1,40	1,97	-0,05	1,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,03	2,99	-0,25	-3,59	0,96	2,03	0,75	-0,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,24	0,62	0,09	-0,18	0,14	0,06	0,43	0,47
5. Perubahan Inventori								
6. Ekspor Luar Negeri	-7,77	-1,06	-4,84	-7,40	1,72	0,18	17,38	-7,11
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,82	-3,76	-2,34	2,89	-0,16	-21,45	-2,30	7,73
8. Net Ekspor Antar Daerah								
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,70	1,48	-0,04	0,43	1,11	-1,73	1,52	1,99

Lampiran 8.

Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku

Komponen	Distribusi							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	64,10	63,41	63,28	61,03	64,10	65,83	61,63	59,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,43	2,33	2,14	2,09	2,20	2,32	2,25	2,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,60	24,17	24,38	30,81	12,64	24,41	23,01	24,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,83	34,23	38,10	39,53	36,89	37,57	38,43	39,36
5. Perubahan Inventori	-0,04	0,06	0,00	0,01	-0,46	-1,18	0,19	1,23
6. Ekspor Luar Negeri	3,69	3,96	3,61	3,42	4,27	2,52	2,74	2,66
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	1,64	3,09	4,33	1,99	1,08	0,22	0,18	0,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	-16,96	-25,07	-27,19	-34,91	-18,56	-31,24	-28,06	-29,17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 9.

Sumber Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Sumber Pertumbuhan Y on Y							
	2019				2020			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1,32	2,30	2,48	2,39	2,08	0,01	-0,91	-2,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,45	0,34	0,04	0,01	-0,11	-0,12	0,06	-0,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,08	0,04	1,15	0,00	0,66	0,01	-0,84	-5,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,92	1,79	2,99	2,88	2,84	2,31	0,54	-0,61
5. Perubahan Inventori	-0,09	0,06	0,03	0,02	-0,31	-0,93	0,14	0,80
6. Ekspor Luar Negeri	1,04	0,75	0,68	0,47	1,18	-1,01	-0,98	-0,98
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,39	1,08	2,16	0,27	-0,32	-2,13	-3,18	-0,93
8. Net Ekspor Antar Daerah	-4,26	-0,56	-1,51	-0,18	-3,22	-4,00	-1,29	4,72
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,84	3,65	3,71	5,33	3,45	-1,60	-0,10	-2,99

Lampiran 10.

Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB	Distribusi PDRB ADHB	Laju Pertumbuhan Triwulan IV 2020 (persen)		
	Tahun 2020 (Triliun Rupiah)	Tahun 2020 (persen)	q-to-q	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	166,38	4,93	-0,57	-2,99	-0,37
Sumatera Utara	811,28	24,06	0,05	-2,94	-1,07
Sumatera Barat	242,12	7,18	1,64	-2,23	-1,60
Riau	729,17	21,62	0,90	-1,47	-1,12
Jambi	206,85	6,13	1,80	-0,99	-0,46
Sumatera Selatan	458,43	13,60	-2,78	-1,21	-0,11
Bengkulu	73,34	2,17	-0,63	-2,39	-0,02
Lampung	354,63	10,52	-8,28	-2,26	-1,67
Kep. Bangka Belitung	75,53	2,24	2,57	-1,04	-2,30
Kepulauan Riau	254,25	7,54	4,53	-4,46	-3,80
SUMATERA	3.371,98	100,00	-0,49	-2,21	-1,19

DAFTAR PUSTAKA

<https://aceh.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran 2015-2019, Banda Aceh.

-----, 2020, PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II-2020, Banda Aceh.

-----, 2020, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh 2015-2019, Banda Aceh.

-----, 2019, PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2019, Banda Aceh.

Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik, Penyusunan Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio* 2011, 2012, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, hlm.83-95, Yogyakarta.

Tomi Kuntara, Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Jawa, 2016,

<https://www.aceh.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: bps1100@bps.go.id



9 772502 088008